Forum on Understanding and Developing Advanced Innovation for Elementary Studies in Indonesia
Volume 1, Number 1, 2026 pp. 1-14

Open Access: https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/fundanesa

Kesiapan SD Negeri Kota Denpasar dalam Mengimplementasikan Bahasa Inggris Wajib: Implikasi bagi Pendidikan Dasar

Putu Ayu Eka Candrawati[1], I Wayan Suastra[1], I Wayan Lasmawan[1]

[1]Universitas Pendidikan Ganesha

***Correspondence author:** ayu.eka.candrawati@student.undiksha.ac.id

Article History
Received : 12 Juli 2026
Acccepted : 22 August 2026
Published : 01 Januari 2026

Keywords
Education Policy;
School Readiness;
English as a Subject in Basic Education;
Compulsory English Teacher Education;

Abstract

The transition of English from an elective to a compulsory subject in Indonesian elementary schools beginning in the 2027/2028 academic year requires schools to demonstrate adequate implementation readiness. This study aimed to analyze the readiness of public elementary schools in Denpasar City to implement this policy. A descriptive qualitative approach was employed involving eight principals of public elementary schools as the main informants. Data were collected through semi-structured interviews, supported by school profile checklists, and validated through source triangulation with an education supervisor and an education office representative. Data were analyzed using the interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that schools have demonstrated readiness in terms of policy communication, principals' commitment, understanding of policy objectives, organizational arrangements, and stakeholder support. However, schools cannot yet be considered fully prepared because the resource dimension, particularly the availability of qualified English teachers, remains inadequate. Most schools still rely on classroom teachers or committee-funded honorary teachers to deliver English instruction, indicating a gap between national policy expectations and local implementation capacity. The findings demonstrate that the shortage of qualified teachers remains the key challenge in implementing compulsory English policy, implying the need to strengthen teacher education through enhanced English for Young Learners preparation, policy implementation competencies, continuous professional development, and stronger collaboration between Teacher Education Institutions and primary schools.

Pendahuluan

Penguasaan Bahasa Inggris menjadi salah satu kompetensi esensial yang dibutuhkan peserta didik untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Sebagai bahasa internasional, Bahasa Inggris berperan penting dalam mendukung kemampuan komunikasi global, literasi digital, akses terhadap ilmu pengetahuan, serta daya saing sumber daya manusia. Sementara itu, sebagian besar negara ASEAN telah mewajibkan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Emilia et al., 2025).

Di Indonesia, kebijakan pembelajaran Bahasa Inggris pada jenjang sekolah dasar mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Melalui Permendikbudristek Nomor 12

*This is an open access article under the **CC BY SA** license*

Tahun 2024 Pasal 33 yang mengatur bahwa mata pelajaran Bahasa Inggris pada sekolah dasar menjadi mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan sampai dengan tahun ajaran 2026/2027. Selanjutnya, mulai tahun ajaran 2027/2028, Bahasa Inggris ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib. Penguatan kebijakan tersebut kemudian dipertegas melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Peraturan ini mengatur struktur kurikulum yang menempatkan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib pada jenjang sekolah dasar mulai kelas III sampai dengan kelas VI, sekaligus menetapkan alokasi jam pelajaran sebagai pedoman implementasi di satuan pendidikan.

Kebijakan penetapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi global peserta didik. Namun, implementasi kebijakan ini berpotensi menghadapi berbagai tantangan akibat keragaman bahasa di Indonesia serta belum optimalnya kesiapan sistem pendukung kebijakan (Zein, 2026a, 2026b). Tantangan lainnya adalah kualifikasi dan pelatihan guru, perbedaan sarana dan prasarana, serta motivasi dan keterlibatan siswa (Candrawati & Purbani, 2025; Imran et al., 2024; Purwanti & Prasanti, 2025; Puspaningrum, 2025). Guru menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, seperti mengintegrasikan konteks lokal ke dalam pembelajaran, menyederhanakan materi, serta menerapkan pendekatan pembelajaran kolaboratif (Candrawati & Purbani, 2025). Adapun strategi pembelajaran yang dapat dilakukan adalah yang berpusat pada murid, seperti gamifikasi, Pembelajaran Berbasis Proyek (PBL), bermain peran, *story-telling*, serta integrasi teknologi (Gelizon, 2024; Krishna Radi & Md Zabit, 2026; Nhan et al., 2026).

Sebagian besar penelitian sebelumnya masih menempatkan guru sebagai fokus utama analisis, baik dalam konteks implementasi pembelajaran, persepsi terhadap kebijakan, maupun tantangan pengajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar. Sementara itu, sekolah sebagai organisasi pelaksana kebijakan belum banyak dikaji secara komprehensif. Akibatnya, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai sejauh mana kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SD. Kesenjangan tersebut menjadi penting untuk dikaji mengingat sekolah merupakan pelaksana utama yang bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Penelitian ini difokuskan pada SD Negeri di Kota Denpasar karena daerah ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan banyak wilayah lain di Indonesia. Sebagai ibu kota Provinsi Bali sekaligus pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian, dan pariwisata internasional, Kota Denpasar memiliki intensitas interaksi global yang tinggi sehingga penguasaan Bahasa Inggris menjadi salah satu kompetensi yang semakin dibutuhkan sejak jenjang pendidikan dasar.

Hasil eksplorasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah telah mengimplementasikan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran intrakurikuler, bahkan beberapa sekolah juga menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler Bahasa Inggris sebelum kebijakan wajib diberlakukan secara nasional. Kondisi tersebut memberikan konteks yang menarik untuk mengkaji sejauh mana sekolah yang telah memiliki pengalaman implementasi siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang menetapkan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027/2028.

Risalah Kebijakan PSKP Tahun 2024 (Relisa et al., 2024) memberikan gambaran nasional mengenai kondisi pembelajaran Bahasa Inggris serta menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan. Namun, kajian tersebut dilakukan sebelum kebijakan implementasi Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib dan belum menggambarkan kesiapan sekolah pada konteks daerah tertentu setelah terbitnya Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 dan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mendeskripsikan kesiapan SD Negeri di Kota Denpasar dalam mengimplementasikan kebijakan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib berdasarkan perspektif implementasi kebijakan. Selain itu, penelitia ini juga bertujuan untuk mendiskusikan implikasi terhadap

pendidikan guru sebagai masukan bagi pengembangan kompetensi dan penyiapan calon guru sekolah dasar. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang bermanfaat bagi pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta pengambil kebijakan dalam merancang strategi implementasi yang lebih efektif.

Teori Implementasi Kebijakan

Penelitian ini menggunakan perspektif implementasi kebijakan sebagai landasan untuk menganalisis kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib. Perspektif ini dipilih karena implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di tingkat satuan pendidikan. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Sementara itu, Van Meter & Van Horn (1975) menekankan pentingnya tujuan kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana, sumber daya, komunikasi antarlembaga, serta kondisi lingkungan implementasi. Sabatier & Mazmanian (1980) memandang keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh karakteristik masalah, kemampuan kebijakan mengarahkan implementasi, dan faktor lingkungan eksternal. Berdasarkan sintesis ketiga teori tersebut, penelitian ini mengkaji kesiapan sekolah melalui enam dimensi implementasi, yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya, komitmen dan kesiapan pelaksana, pemahaman tujuan kebijakan, struktur organisasi implementasi, serta dukungan dan tantangan lingkungan implementasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kesiapan SD Negeri di Kota Denpasar dalam mengimplementasikan kebijakan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027/2028. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur yang berpedoman pada panduan wawancara yang telah disusun berdasarkan sintesis teori implementasi kebijakan Edwards III (1980), Van Meter & Van Horn (1975), serta Sabatier & Mazmanian (1980). Sebelum wawancara dilakukan, peneliti mendokumentasikan karakteristik sekolah melalui lembar profil sekolah yang diisi bersama informan. Informasi tersebut digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik partisipan dan memberikan konteks terhadap hasil wawancara.

Informan utama dalam penelitian ini adalah delapan kepala SD Negeri di Kota Denpasar yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterwakilan wilayah administratif Kota Denpasar. Dari 4 wilayah, yakni Denpasar Utara, Denpasar Selatan, Denpasar Barat dan Denpasar Timur masing masing dipilih 2 kepala SD Negeri. Selain itu, untuk memperkuat kredibilitas data, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung, yaitu 1 pengawas sekolah dasar dan 1 pegawai dinas pendidikan yang memahami implementasi kebijakan Bahasa Inggris pada jenjang sekolah dasar. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan yang relevan dalam pelaksanaan kebijakan sehingga mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai kesiapan implementasi di tingkat satuan pendidikan.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (Miles et al., 2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tahap pertama diawali dengan mentranskripsikan seluruh hasil wawancara dari bentuk rekaman ke dalam bentuk teks secara verbatim. Selanjutnya, peneliti membaca transkrip secara berulang untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap data yang telah diperoleh. Apabila terdapat informasi yang kurang jelas, peneliti melakukan klarifikasi kepada informan (*member checking*) guna memastikan kesesuaian antara hasil transkripsi dengan maksud yang disampaikan oleh informan.

Pada tahap berikutnya, peneliti melakukan proses pengodean (*coding*) terhadap setiap unit makna yang muncul dalam transkrip wawancara. Kode-kode yang memiliki makna serupa kemudian dikelompokkan ke dalam kategori sesuai dengan enam dimensi implementasi kebijakan yang menjadi kerangka analisis penelitian, yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya, komitmen dan kesiapan pelaksana, pemahaman tujuan kebijakan, struktur organisasi implementasi, serta dukungan dan tantangan lingkungan implementasi. Hasil pengelompokan tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk matriks analisis untuk mempermudah identifikasi pola, persamaan, dan perbedaan antarinforman sebelum dilakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan keabsahan data, hasil wawancara dibandingkan dengan data profil sekolah serta informasi dari informan pendukung, yakni 1 pegawai dinas pendidikan dan 1 pengawas sekolah melalui teknik triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

Hasil wawancara terkait dengan profil sekolah pada Tabel 1. menunjukkan bahwa dari 8 sekolah, 6 sekolah telah mengimplementasikan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib (intrakurikuler), dimana 2 sekolah masih menjadikannya sebagai muatan lokal. Berkaitan dengan latar belakang pendidikan pengampu, terdapat 4 guru honor dari 8 sekolah yang berlatar belakang pendidikan Bahasa Inggris. Di sisi lain, terdapat 5 guru kelas berlatar belakang PGSD namun memiliki kemampuan Bahasa Inggris dan terdapat 10 guru kelas yang awalnya berlatar belakang pendidikan Bahasa Inggris, tapi kemudian mengikuti penyetaraan PGSD. Sejauh ini, memang belum ada guru tetap khusus untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris.

Tabel 1. Karakteristik Sekolah Partisipan

Kode	**Wilayah**	**Pelaksanaan Bahasa Inggris**	**Latar Belakang Pendidikan Pengampu Bahasa Inggris**		
			Pendidikan Bahasa Inggris	**PGSD (tapi memiliki kemampuan berbahasa Inggris)**	**Pendidikan Bahasa Inggris dan PGSD (Mengikuti Penyetaraan)**
KS 1	Denpasar Barat	Muatan lokal (Mulok)	1 guru honor	-	3 orang guru kelas
KS 2	Denpasar Barat	Intrakurikuler dan ekstrakurikuler	1 guru honor	3 guru kelas	1 guru kelas
KS 3	Denpasar Selatan	Intrakurikuler	-	-	1 guru kelas
KS 4	Denpasar Selatan	Muatan lokal (Mulok)	1 guru honor	-	-
KS 5	Denpasar Timur	Intrakurikuler dan ekstrakurikuler	-	-	1 guru kelas

KS 6	Denpasar Timur	Intrakurikuler dan ekstrakurikuler	1 guru honor	1 guru kelas	-
KS 7	Denpasar Utara	Intrakurikuler dan ekstrakurikuler	-	-	1 guru kelas
KS 8	Denpasar Utara	Intrakurikuler dan ekstrakurikuler	-	1 guru kelas	3 guru kelas

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis wawancara terhadap delapan kepala sekolah SD Negeri di Kota Denpasar, diperoleh enam tema utama yang merepresentasikan kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib, yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya, komitmen dan kesiapan pelaksana, struktur organisasi implementasi, pemahaman tujuan kebijakan, serta dukungan dan tantangan lingkungan implementasi. Sebagaimana disajikan pada Tabel 2, temuan menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah tersampaikan dengan baik melalui berbagai saluran sosialisasi, kepala sekolah memiliki pemahaman yang baik terhadap tujuan kebijakan, serta menunjukkan komitmen yang tinggi untuk mendukung implementasinya. Selain itu, implementasi Bahasa Inggris telah terintegrasi dalam pengelolaan sekolah melalui mekanisme pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah, dengan dukungan yang cukup baik dari orang tua dan komite sekolah. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa keterbatasan guru Bahasa Inggris yang kompeten masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan, sehingga aspek sumber daya menjadi faktor yang belum terpenuhi dalam hal kesiapan sekolah.

Tabel 2. Hasil Analisis Tematik Kesiapan Sekolah

Dimensi	**Kategori**	**Tema**
Komunikasi Kebijakan	Sosialisasi kebijakan; Sumber informasi;	Komunikasi kebijakan telah tersampaikan melalui berbagai saluran sosialisasi.
Sumber Daya	Ketersediaan guru; Kompetensi guru; sarana prasarana	Keterbatasan guru kompeten menjadi tantangan utama implementasi kebijakan, sedangkan sekolah telah memiliki sarana prasarana yang cukup.
Komitmen dan Kesiapan Pelaksana	Komitmen kepala sekolah; respon guru	Sekolah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung implementasi kebijakan, sedangkan guru merasa khawatir terhadap implementasinya
Struktur Organisasi Implementasi	Pengorganisasian implementasi; pelaksanaan implementasi; monitoring dan evaluasi implementasi	Implementasi Bahasa Inggris telah terintegrasi dalam pengelolaan sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah.

Pemahaman Tujuan Kebijakan	Tujuan kebijakan; Manfaat bagi peserta didik	Sekolah memahami tujuan strategis kebijakan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib.
Dukungan dan Tantangan Lingkungan Implementasi	Dukungan orang tua; Dukungan komite; Tantangan implementasi	Implementasi kebijakan didukung stakeholders, tetapi masih menghadapi tantangan sumber daya.

1. Komunikasi Kebijakan sebagai Faktor Awal Kesiapan Implementasi

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas kepala sekolah mengetahui kebijakan melalui laman Kemendikdasmen, Info GTK, *workshop*, webinar, pengawas sekolah, dan Peraturan Menteri yang diinfokan oleh dinas. Berikut respon kepala sekolah:

> "*Kami mengikuti informasi dari Info GTK dan juga Kemendikdasmen……. setiap ada kebijakan baru, jadi Permendikdasmen yang terbaru, kita diwajibkan untuk mengikuti baik itu kegiatan peluncurannya, kegiatan awalnya, melalui sosialisasi di laman Kemendikdasmen*." (KS 5)

> "*Melalui workshop, mungkin pelatihan-pelatihan, sosialisasi. Biasanya di workshop diselipin* (sosialisasi),….." (KS 6)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa proses komunikasi kebijakan telah berlangsung melalui saluran resmi sehingga kepala sekolah memiliki pemahaman awal mengenai perubahan status mata pelajaran Bahasa Inggris. Hal ini juga dikonfirmasi oleh pegawai dinas pendidikan kota Denpasar sebagai berikut:

> " *biasanya kami sosialisasikan sewaktu pelatihan, jadi bisa sekalian…*" (PD 1)

Menurut teori Edwards III**,** komunikasi yang jelas, konsisten, dan tersampaikan kepada pelaksana merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan. Sosialisasi merupakan proses yang kompleks dan multidimensional yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan dengan membentuk sikap, perilaku, serta interaksi di antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan (Aby, 2026; Hascoët et al., 2021; Mierzejewski et al., 2024; Trong, 2022). Disisi lain, upaya sosialisasi perlu mempertimbangkan keragaman kondisi implementasi, seperti perbedaan ukuran sekolah, pengalaman guru, dan dinamika pembelajaran di kelas, sehingga implementasi kebijakan dapat berlangsung secara lebih efektif dan optimal (Coelho et al., 2023; Coelho & Sousa, 2018). Dapat diintepretasikan bahwa komunikasi kebijakan di Kota Denpasar telah berjalan relatif baik karena seluruh informan memahami perubahan status Bahasa Inggris sebelum kebijakan berlaku penuh.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia sebagai Tantangan Utama Implementasi

Penyediaan sumber daya yang memadai, termasuk tenaga pendidik, bahan ajar, sarana pendukung, serta distribusi sumber daya yang merata, menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib (Rahman et al., 2026; Zein, 2026). Berikut kutipan hasil wawancara dengan kepala sekolah:

> "*Kalau memadai sih belum. Dari 18 kelas itu, mungkin hanya 4 rombol guru yang bisa mengajarkan itu. Guru kelasnya maksudnya. Itu ditambah satu guru honor yang memang*

punya basic Bahasa Inggris. Jadi kami menganggap itu belum memadai. Kalau itu harus diajarkan, diampu oleh guru kelasnya masing-masing. Mungkin masih ada kendala, karena kemampuan setiap guru itu beda-beda. Mereka juga bukan basic Bahasa Inggris." (KS 1)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sekolah masih mengalami keterbatasan guru yang kompeten. Kondisi tersebut menyebabkan sekolah menggunakan berbagai strategi adaptasi, seperti menugaskan guru kelas, guru kelas berlatar belakang Pendidikan Bahasa Inggris, atau guru honorer yang dibiayai komite sekolah. Hal ini dikonfirmasi oleh pegawai dinas pendidikan kota Denpasar:

"*Untuk pengangkatan guru mapel Bahasa Inggris, memang belum ada*." (PD 1)

Disisi lain, ketentuan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 Pasal 33 C yang mengamanatkan pemeritah daerah untuk bertanggung jawab untuk menyediakan guru Bahasa Inggris selama masa transisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amanat tersebut belum sepenuhnya terwujud di tingkat daerah sehingga sekolah harus mengembangkan strategi internal untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran. Temuan ini sejalan dengan Edwards III yang menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya merupakan faktor penentu implementasi kebijakan, serta teori Van Meter dan Van Horn yang menempatkan sumber daya sebagai variabel utama keberhasilan implementasi.

Disisi lain, tantangan implementasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan guru, tetapi juga dengan mekanisme dukungan yang belum memadai. Ketidakjelasan tujuan kebijakan serta terbatasnya mekanisme dukungan dapat menghambat implementasi kebijakan. Dalam kondisi tersebut, guru sering mengalami kesulitan karena ekspektasi terhadap pelaksanaan kebijakan belum dipahami secara jelas dan sumber daya yang tersedia masih terbatas (Wright et al., 2021). Pada konteks penelitian ini, meskipun tujuan kebijakan telah dipahami dengan baik, keterbatasan sumber daya manusia tetap menjadi hambatan utama dalam implementasi.

Sebagian besar guru sekolah dasar belum memiliki kualifikasi akademik atau pelatihan formal dalam bidang Bahasa Inggris. Sejalan dengan hasil wawancara Purwanti & Prasanti (2025) juga mengungkapkan bahwa guru kelas sering diberi tanggung jawab untuk mengampu mata pelajaran tersebut meskipun kompetensi kebahasaan dan pedagogis yang dimiliki masih terbatas sehingga kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar (Purwanti & Prasanti, 2025). Ditambah lagi dengan keterbatasan pelatihan, besarnya jumlah siswa dalam kelas, serta terbatasnya waktu untuk merencanakan pembelajaran menjadi faktor yang semakin memperberat implementasi pembelajaran secara efektif (Sofiana et al., 2024; Zein, 2016). Berkaitan dengan hal ini, pengembangan profesional melalui program pelatihan yang terarah diperlukan untuk membekali guru dengan kompetensi yang memadai dalam mengajarkan Bahasa Inggris secara efektif, khususnya pada konteks sekolah dasar yang memiliki karakteristik peserta didik dan lingkungan belajar yang beragam (Purwanti & Prasanti, 2025; Zein, 2016, 2026). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi guru dan pemenuhan tenaga pendidik merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dasar.

Disisi lain, sarana dan prasarana sekolah cukup beragam untuk menunjang pembelajaran Bahasa Inggris seperti buku paket, buku cerita, Papan Interaktif Digital serta internet.

"*Nggih, sangat cukup karena kita dari dana BOS itukan untuk buku itu sudah memadai sekali di kita fasilitasnya,.... Media nya yang pertama itu buku bahasa inggrisnya sudah ada, kemudian kita menggunakan platform digital itu untuk mengakses mengakses aplikasi media yang berbahasa Inggris kemudian, disamping itu juga kami sudah menyediakan juga proyektor sudah ada dari sekolah, buku cerita*

berbahasa inggris sudah ada dipojok membaca udah itu saja, kami juga memiliki IFP namanya disini, Interaktif Flat Panel." (KS 2)

Ketersediaan fasilitas tersebut mencerminkan adanya komitmen sekolah dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk menunjang implementasi kebijakan. Pemanfaatan dana BOS untuk pengadaan buku dan media pembelajaran juga menunjukkan bahwa sekolah telah mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan pembelajaran Bahasa Inggris. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan komponen sumber daya, dimana sumber daya fisik berupa sarana dan prasarana telah tersedia, sedangkan sumber daya manusia belum memadai.

3. Komitmen Pelaksana dan Pemahaman Tujuan Kebijakan sebagai Modal Implementasi

Meskipun menghadapi persoalan keterbatasan guru Bahasa Inggris, hasil penelitian memperlihatkan bahwa seluruh kepala sekolah mendukung kebijakan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib dan memahami tujuan kebijakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi peserta didik dalam menghadapi tantangan global.

> "*Yang pertama itu, sikap saya sangat mendukung, bahkan itu menjadi program saya yang akan diprioritaskan*." (KS 2)

Menurut teori Edwards III, disposisi atau komitmen pelaksana menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komitmen pelaksana dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam praktik di lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor penting dalam membangun kesiapan sekolah. Hal ini sejalan dengan temuan Risalah Kebijakan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (Relisa et al., 2024) yang menunjukkan bahwa mayoritas kepala sekolah dan guru mendukung kebijakan penetapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dasar. Penerimaan dan komitmen kepala sekolah maupun guru merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi program di tingkat sekolah (Anyon et al., 2016; Wright et al., 2021). Hal ini juga dikonfirmasi oleh pengawas sekolah.

> "*Mengingat (Bahasa Inggris) menjadi mapel yang masuk kurikulum, tentu komitmen kepsek harus terjaga*". (PS 1)

Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan implementasi di Kota Denpasar tidak berasal dari rendahnya komitmen kepala sekolah, melainkan lebih disebabkan oleh keterbatasan sumber daya. Kepala sekolah mendukung kebijakan dan tetap menyelenggarakan pembelajaran Bahasa Inggris meskipun menghadapi keterbatasan guru. Di sisi lain, hampir semua guru kelas mengeluh dengan beban mengajar yang bertambah dan merasa belum memiliki kompetensi yang cukup di bidang Bahasa Inggris.

> "*dengan kejujurannya mengeluh, aduh saya kurang mampu, soalnya hanya satu materi saya bisa, apa yang dicontohin, dipelatihin, itu saya mampu lakukan, tapi yang lainnya tidak bisa mereka…… Ada keraguan akibat dari merasa kurang kompeten dalam bidang itu, sehingga kan bagi saya memang perlu pelatihan yang banyak."*(KS 4)

> "*Dengan munculnya sekarang Bahasa Inggris adalah muatan mata pelajaran wajib, berharap sekali guru-guru itu juga ada tenaga khusus yang mengajar Bahasa Inggris dengan kompetensi yang linier. Karena guru kelas, terutama di SD itu banyak beban.*" (KS 5)

Kutipan ini sejalan dengan temuan bahwa guru memandang bahwa kompetensi mengajar Bahasa Inggris mencakup kemampuan berkomunikasi, penguasaan pengetahuan pedagogis, serta kemampuan

untuk mendukung kebutuhan belajar peserta didik yang beragam (Han & Ahn, 2023; Kyungja, 2024). Maka disaat mereka merasa bahwa mereka belum memiliki kemampuan tersebut, maka pembelajaran Bahasa Inggris menjadi tidak maksimal.

4. Struktur Organisasi Implementasi Mendukung Fleksibilitas Pelaksanaan

Berdasarkan Tabel 1, hampir seluruh sekolah telah mengintegrasikan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran intrakurikuler. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Bahasa Inggris telah menjadi bagian dari pengelolaan sekolah, namun mekanisme pelaksanaannya masih beragam sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing sekolah.

> "*Di (kelas) 1-2 dia ekstra kurikuler. Kelas 3 sampai kelas 6 dia jadi mata pelajaran intra, utama*." (KS 7)

> "*Itu masuk di kegiatan review kurikulum, di struktur kurikulum. Nah sampai saat ini, sepertinya juga tahun 2026-2027, itu masih sebagai mata pelajaran pilihan untuk kelas 3, 4, 5, 6. Untuk di sekolah ini, kelas 1, 2 menjadi ekstra wajib*." (KS 8)

Pemerintah telah menetapkan struktur kurikulum dan alokasi waktu pembelajaran Bahasa Inggris melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Hal ini sejalan dengan Puspitasari et al., (2022) yang menyatakan bahwa pengembangan kurikulum Bahasa Inggris yang jelas dan terstandar pada jenjang sekolah dasar diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran sehingga implementasi kebijakan dapat berlangsung secara konsisten di seluruh satuan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, tentu hal ini belum terealisasikan sebab mekanisme penugasan guru serta pengaturan pembelajaran masih disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah.

Terkait dengan monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari struktur organisasi implementasi, lebih banyak dilakukan oleh kepala sekolah. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui asessmen yang disiapkan oleh guru.

> "*Tentu karena kita juga ada jadwal supervisi pembelajaran kita melaksanakan dari sana saja. Jadi kita membuat jadwal pelaksanaan supervisi kelas, kemudian kita juga memantau dari event-event yang diikuti*." (KS 5)

> "*Melalui hasil sumatif dan formatif murid. Dan melalui laporan guru secara lisan maupun tertulis laporan pendidikan anak-anak*" (KS 8)

Hal ini juga dikonfirmasi oleh pengawas sekolah:

> "*Supervisi akademik dilakukan oleh kepala sekolah…..monitoring kepada kepala sekolaj dilakukan melalui pengelolaan kinerja, topik pendampingan pun umumnya dipilih berdasarkan apa yang dipilih kepala sekolah.*" (PS 1)

Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pelaksana, termasuk adanya mekanisme koordinasi, supervisi, dan monitoring yang memastikan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, supervisi akademik dan monitoring yang dilakukan secara berjenjang menunjukkan bahwa struktur organisasi sekolah telah berfungsi dalam mendukung implementasi kebijakan. Supervisi akademik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dengan meningkatkan kinerja guru, mendorong pengembangan profesional secara berkelanjutan, serta membantu mengatasi kesenjangan kompetensi guru dalam

melaksanakan proses pembelajaran (Lamatenggo & Suking, 2026; Munawaroh et al., 2020; Ratnawati et al., 2026; Ting & Chuang, 2025).

Meskipun mekanisme monitoring dan evaluasi telah berjalan dengan baik, pengawasan tersebut masih berorientasi pada pelaksanaan pembelajaran Bahasa Inggris yang telah berlangsung di sekolah, belum secara spesifik diarahkan pada kesiapan implementasi kebijakan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah telah memiliki sistem supervisi akademik yang mapan, namun masih memerlukan pedoman operasional yang lebih spesifik untuk mendukung implementasi kebijakan baru.

5. Dukungan *Stakeholders* Belum Diikuti Dukungan Sumber Daya Pemerintah Daerah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib memperoleh dukungan yang positif dari berbagai pihak, khususnya orang tua, komite sekolah, dan dinas terkait.

> "*Kalau di sekolah ini dukungan pemerintah itu cukup besar menyediakan pelatihan-pelatihan berbahasa Inggris. Dari orang tua, komite sekolah disini sangat luar biasa bahkan mereka bisa mendanai guru Bahasa Inggris dengan layak, UMR, itu dari dana iuran orang tua dan komite*." (KS 2)

Partisipasi komite sekolah dalam hal ini adalah penyediaan guru honorer untuk mendukung pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah. Selain itu, dukungan pemerintah juga tercermin dalam penyediaan pelatihan-pelatihan berkala yang dilakukan oleh dikpora, seperti yang dikonfirmasi oleh pengawas sekolah:

> "*Dinas dukungannya dengan pelatihan yang sudah dilaksanakan. Pelatihan yang berkala tentu terus dilakukan oleh dikpora. Namun demikian, tidak hanya pada satu kompetensi Bahasa Inggris saja. Setiap tahun, fokus kompetensi yang dilatihkan tentu berbeda mengingat pos anggaran yang sudah ditetapkan.*" (PS 1)

Meskipun demikian, kepala sekolah menilai bahwa tantangan utama implementasi masih terletak pada aspek sistemik, terutama keterbatasan guru Bahasa Inggris yang kompeten dan belum optimalnya dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan tenaga pendidik.

> "*kalau tantangannya, sebenarnya yang beratnya dari wali kelas harus menjadi guru bahasa inggris, harus belajar lagi,….kalau kelas 1,2,3 mungkin masihlah bisa, kalau kelas tinggi harus belajar lagi*." (KS 3)

> "*berharap dari pemerintah melalui dinasdikpora kita yang notabene memiliki bidang tenaga tendik, tenaga kependidikan kita berharap beliau bisa menyediakan tenaga Bahasa Inggris."*(KS 5)

> "*Tantangan terbesarnya adalah tenaga yang berkompeten di pembelajaran Bahasa Inggris."*(KS 6)

Padahal, Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 menegaskan bahwa selama masa transisi, pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan guru Bahasa Inggris pada sekolah dasar untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Temuan ini sejalan dengan Rahman et al.,(2026) yang menyatakan bahwa para pemangku kepentingan, termasuk guru dan kepala sekolah, mengidentifikasi berbagai permasalahan sistemik, seperti keterbatasan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi, kurang

memadainya sumber daya pendukung, serta pedoman implementasi kurikulum yang belum konsisten sebagai hambatan utama dalam mewujudkan kesiapan implementasi kebijakan.

Pada konteks penelitian ini, temuan tersebut menunjukkan bahwa dukungan masyarakat saja belum cukup untuk menjamin kesiapan sekolah apabila belum diikuti oleh dukungan kebijakan yang diwujudkan melalui pemenuhan sumber daya manusia dan penguatan mekanisme implementasi di tingkat daerah. Kondisi tersebut sesuai dengan teori Mazmanian dan Sabatier yang menempatkan kondisi sosial, ekonomi, dan dukungan institusi sebagai faktor eksternal yang memengaruhi implementasi kebijakan. Sehingga, dapat diinterpretasikan bahwa dukungan orang tua dan komite sekolah cukup baik, namun keterbatasan guru kompeten dan dukungan pemerintah daerah masih menjadi tantangan utama

Implikasi Terhadap Pendidikan Guru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sekolah relatif siap mengimplementasikan kebijakan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib, keterbatasan guru yang kompeten masih menjadi tantangan utama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sekolah, tetapi juga oleh kesiapan sistem pendidikan guru dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Berikut adalah empat implikasi hasil penelitian terhadap pendidikan guru:

1. **Penguatan kurikulum pendidikan guru**. Program pendidikan prajabatan guru saat ini masih belum optimal dalam membekali calon guru sekolah dasar dengan kompetensi mengajar Bahasa Inggris. Kelemahan yang sering dilaporkan mencakup keterbatasan kemampuan berbahasa Inggris, ketidakseimbangan antara penguasaan teori dan pengalaman praktik, serta minimnya pengalaman belajar yang kontekstual (Damayanti & Meisani, 2025; Hadi, 2019).

2. **Pengembangan kompetensi implementasi kebijakan.** Hasil wawancara mengenai pentingnya komunikasi dan komitmen pelaksana menunjukkan bahwa calon guru perlu dibekali kemampuan memahami dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Berkaitan dengan hal ini, calon guru dengan penguasaan Pengetahuan Pedagogis tentang Materi Ajar yang baik memiliki kesiapan yang lebih tinggi untuk mengimplementasikan reformasi pendidikan yang didasarkan pada perubahan kebijakan (Mahmud et al., 2023).

3. **Pengembangan profesional berkelanjutan.** Masih terbatasnya guru yang kompeten mengajar Bahasa Inggris menunjukkan perlunya pengembangan profesional bagi guru yang telah bertugas. Program dapat berupa kegiatan kolaboratif seperti *coaching and mentoring*, observasi antar guru dan umpan balik, *lesson study*, serta komunitas belajar (Lara et al., 2025; Patthoff, 2024). Selain itu, pengembangan profesional dapat berupa *In-Service Training* yang bersifat formal dan informal, seperti workshop, seminar, program berbasis sekolah, serta *micro-teaching* (Henry & Namhla, 2020; Hung et al., 2025).

4. **Kolaborasi antara LPTK dan sekolah.** Hasil penelitian mengindikasikan perlunya sinergi antara LPTK, pemerintah daerah, dan sekolah dalam menyiapkan guru yang sesuai dengan kebutuhan implementasi kebijakan. Kolaborasi antara LPTK dan sekolah dasar memegang peran penting dalam menyiapkan guru dengan kompetensi Bahasa Inggris. Melalui integrasi program praktik lapangan, pendampingan (*mentorship*), dan pengembangan profesional, kemitraan tersebut memastikan bahwa calon guru memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan pembelajaran EYL secara efektif (Baroudi & Hojeij, 2022; Chou, 2019; Dumayas, 2026).

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa meskipun SD Negeri di Kota Denpasar telah memiliki kesiapan pada aspek komunikasi kebijakan, komitmen pelaksana, struktur organisasi implementasi, dan dukungan lingkungan, sekolah belum dapat dikategorikan siap secara optimal dalam mengimplementasikan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib. Hal ini disebabkan oleh belum terpenuhinya aspek sumber daya, terutama ketersediaan guru Bahasa Inggris yang kompeten, yang merupakan prasyarat utama dalam penyelenggaraan pembelajaran. Dengan demikian, kesiapan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh dukungan organisasi dan pemahaman terhadap kebijakan, tetapi juga sangat bergantung pada pemenuhan sumber daya manusia sebagai faktor fundamental keberhasilan implementasi. Hal ini berimplikasi pada pendidikan guru, diantaranya penguatan kurikulum, pengembangan kompetensi implementasi kebijakan, pengembangan profesional keberlanjutan serta kolaborasi antara LPTK dan sekolah.

Cakupan penelitian ini terbatas hanya pada SD Negeri di Kota Denpasar sehingga belum menggambarkan variasi kesiapan sekolah pada daerah dengan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif pada berbagai wilayah untuk memperoleh gambaran implementasi kebijakan yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

Aby, G. (2026). The role of family educational context in modulating the effects of educational policies – The case of social promotion of primary school students in Côte d'Ivoire. *International Journal of Educational Development*, *121*. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2026.103510

Anyon, Y., Nicotera, N., & Veeh, C. A. (2016). Contextual Influences on the Implementation of a Schoolwide Intervention to Promote Students' Social, Emotional, and Academic Learning. *Children and Schools*, *38*(2), 81–82. https://doi.org/10.1093/cs/cdw008

Baroudi, S., & Hojeij, Z. (2022). Innovative Practices Implemented by Preservice Teachers During Their Field Experience: Lesson Learnt from Face-to-Face and Online Field Placement. In *Handbook of Research on Teacher Education: Pedagogical Innovations and Practices in the Middle East* (pp. 141–152). https://doi.org/10.1007/978-981-19-2400-2_9

Candrawati, A. C., & Purbani, W. (2025). Teaching English in rural settings: A systematic review of challenges and strategies in non-technological classrooms. *English Language Teaching Educational Journal*, *8*(2), 66–77. https://doi.org/10.12928/eltej.v8i2.14081

Chou, C.-H. (2019). Investigating EFL Elementary Student Teachers' Development in a Professional Learning Practicum. In *Teachers' Professional Development in Global Contexts: Insights from Teacher Education* (pp. 23–41). https://doi.org/10.1163/9789004405363_002

Damayanti, I. L., & Meisani, D. R. (2025). Teacher Education for Primary English Teachers. In *The Routledge International Handbook of English Language Education in Indonesia* (pp. 358–375). https://doi.org/10.4324/9781003399308-27

Dumayas, J. T. (2026). Bridging Theory and Practice: How Field Study and Practicum Contribute to Preservice Teachers' Classroom Management and Assessment Proficiency. *TEM Journal*, *15*(2), 1416–1433. https://doi.org/10.18421/TEM152-39

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quartely Press.

Emilia, E., Siagian, E. N. M., Novianti, N., Dwiyana, R., Muniroh, R. D. D.-A., & Fikrianto, M. (2025). Unveiling English language education policies across primary and secondary levels in ASEAN. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, *14*(3), 484–495. https://doi.org/10.17509/ijal.v14i3.75898

Gelizon, M. J. B. (2024). Play to learn: Exploring the impact of fun english classes on the literacy skills of elementary learners. *Environment and Social Psychology*, *9*(10). https://doi.org/10.59429/esp.v9i10.3164

Hadi, A. (2019). Exploring preparation of pre-service teachers' English proficiency and pedagogy: Stories from an EFL teacher education program. *Qualitative Report*, *24*(8), 1946–1966. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092073235&partnerID=40&md5=d8625df03295e515f93f47d9dc13d104

Han, E., & Ahn, K. (2023). Exploring Korean elementary teachers' perceptions, experiences, and related factors of teaching written English for 3rd and 4th graders. *Korean Journal of English Language and Linguistics*, *23*, 587–609. https://doi.org/10.15738/kjell.23..202307.586

Hascoët, M., Giaconi, V., & Jamain, L. (2021). Family socioeconomic status and parental expectations affect mathematics achievement in a national sample of Chilean students. *International Journal of Behavioral Development*, *45*(2), 122–132. https://doi.org/10.1177/0165025420965731

Henry, C., & Namhla, S. (2020). Continuous professional development for inclusive ECD teachers in Chiredzi Zimbabwe: Challenges and opportunities. *Scientific African*, *8*. https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2020.e00270

Hung, Y.-N., Liu, C.-C., Chen, I.-A., & Lee, S.-T. (2025). Building Bilingual Expertise: Evaluating Professional Development Program for Elementary Teachers in Taiwan. *Journal of Language Teaching and Research*, *16*(4), 1137–1145. https://doi.org/10.17507/jltr.1604.09

Imran, M., Almusharraf, N., Sayed Abdellatif, M., & Ghaffar, A. (2024). Teachers' perspectives on effective English language teaching practices at the elementary level: A phenomenological study. *Heliyon*, *10*(8). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29175

Krishna Radi, T., & Md Zabit, M. N. (2026). Identifying Teachers' Needs for Technology Integration in English Language Teaching. *Lecture Notes in Networks and Systems*, *1576 LNNS*, 83–94. https://doi.org/10.1007/978-3-032-00549-6_7

Kyungja, A. (2024). Exploring novice elementary english teachers' perceptions of teacher expertise and their professional development. *Korean Journal of English Language and Linguistics*, *24*, 589–615. https://doi.org/10.15738/kjell.24..202406.589

Lamatenggo, N., & Suking, A. (2026). The leadership and supervision role of the principal in a public junior high school in Indonesia. *South African Journal of Education*, *46*(1). https://doi.org/10.15700/saje.v46n1a2533

Lara, S., Repenning-Bzdigian, S., & Ibarrola-García, S. (2025). Mapping review of teacher collaborative professional development in early childhood education. *Revista Interuniversitaria de Formacion Del Profesorado*, *100*(NE), 215–240. https://doi.org/10.47553/rifop.v100iNE.106169

Mahmud, A. F., Usman, A. H., Sari, F. W., & Dahlan, S. (2023). Lesson Study Contributions: EFL Teachers' Competences Model in Teaching English at High School 21st-Century Learning Approach. *World Journal of English Language*, *13*(7), 10–17. https://doi.org/10.5430/wjel.v13n7p10

Mierzejewski, S., Broccolichi, S., Joigneaux, C., & Dormoy, C. (2024). The school of disengagement? Over-responsibilisation and powerlessness of teachers in the face of student difficulties. *Revue Francaise de Pedagogie*, *221*(4), 71–88. https://doi.org/10.4000/11w0c

Miles, M.-B., Michael Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Third). https://www.scopus.com/pages/publications/84925135221?origin=resultslist

Munawaroh, S., Noor, M., Santoso, H., & Juhri, A. M. (2020). Computational Analytic of Research Topics on Teacher Performance and Supervision Principal. *Journal of Physics: Conference Series*, *1594*(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1594/1/012009

Nhan, L. K., Quang, L. V. N., & Hoa, N. T. M. (2026). Implementing innovative pedagogical strategies for teaching english in elementary EFL classrooms. *Multidisciplinary Science Journal*, *8*(1). https://doi.org/10.31893/multiscience.2026114

Patthoff, A. (2024). TEACHER PROFESSIONAL LEARNING IN DUAL LANGUAGE PROGRAMS. In *Mathematics Instruction in Dual Language Classrooms: Theory and Research That Informs Practice* (pp. 115–134). https://doi.org/10.1108/979-8-88730-705-320251010

Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, 1 (2024). https://kurikulum.kemdikbud.go.id/file/1711507788_manage_file.pdf
Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, 167 (2025).
Purwanti, E., & Prasanti, S. Y. (2025). Enhancing English teaching in elementary schools: A sociocultural perspectives of non-English major teachers' experiences. *English Language Teaching Educational Journal*, *8*(2), 105–117. https://doi.org/10.12928/eltej.v8i2.13052
Puspaningrum, M. R. (2025). Innovative Strategies in Learning Management in Elementary Schools: Responding to the Dynamics of the Independent Curriculum. *New Educational Review*, *80*(2), 203–217. https://doi.org/10.15804/tner.2025.80.2.14
Puspitasari, M., Cholifah, P. S., & Putra, A. P. (2022). Pengembangan E-Modul Muatan IPS Berbantuan Web Live Worksheet Materi Kegiatan Ekonomi di Lingkungan Sekitar Sampai Provinsi pada Siswa Kelas IV SD. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, *2*(11), 1027–1039. https://doi.org/10.17977/um065v2i112022p1027-1039
Rahman, A., Achmad, W. K. S., Limbong, E., & Arina Nuri Anugrah, A. R. (2026). Immediacy of Teaching English at Elementary Schools in Indonesia. *Journal of Education*, *206*(3), 216–228. https://doi.org/10.1177/00220574251364760
Ratnawati, R., Subiyantoro, S., & Usodo, B. (2026). The Implementation of Academic Supervision by the Principal in Improving Teacher Competence. *AIP Conference Proceedings*, *3464*(1). https://doi.org/10.1063/5.0332389
Relisa, Ulumudin, I., Aisha, A., Fujianita, S., Helga, M., Sisdiana, E., & Adhi R., R. (2024). Risalah Kebijakan: Meningkatkan Kualitas Bahasa Inggris di Satuan Pendidikan. In *Risalah Kebijakan* (Issue Nomor 4, April). Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.
Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY: A FRAMEWORK OF ANALYSIS. *Policy Studies Journal*, *8*(4), 538–560. https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x
Sofiana, N., Andriyani, S., Shofiyuddin, M., Mubarok, H., & Candraloka, O. R. (2024). The implementation of differentiated learning in ELT: Indonesian teachers' readiness. *Forum for Linguistic Studies*, *6*(2). https://doi.org/10.59400/fls.v6i2.1178
Ting, Y.-K., & Chuang, N.-C. (2025). Exploring the Relationship Between Principal Positive Instructional Supervision and Teacher Teaching Effectiveness: A Cross-Sectional Study in Taiwan. *Leadership and Policy in Schools*, *24*(4), 733–752. https://doi.org/10.1080/15700763.2024.2324036
Trong, N. P. (2022). Socialization Of University Education Contributes To The Development Of High Quality Human Resources In Vietnam. *Res Militaris*, *12*(2), 7094–7104. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85142100770&partnerID=40&md5=2611fdcb8570edb5dceb1fc222bfe4a8
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, *6*(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404
Wright, P. M., Gray, S., & Richards, K. A. R. (2021). Understanding the interpretation and implementation of social and emotional learning in physical education. *Curriculum Journal*, *32*(1), 67–86. https://doi.org/10.1002/curj.85
Zein, S. (2016). Pre-service education for primary school English teachers in Indonesia: policy implications. *Asia Pacific Journal of Education*, *36*, 119–134. https://doi.org/10.1080/02188791.2014.961899
Zein, S. (2026). English for young learners (EYL) in Indonesia: Challenges and innovations in a superdiverse context. In *Global Challenges Facing Early Language Teaching: Exploring English Language Learning in Diverse Plurilingual Contexts* (pp. 52–64). https://doi.org/10.4324/9781003643333-6